

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas (*accountability*) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ihyaul Ulum, 2004). Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya (Budi Mulyana, 2006).

Menurut Mardiasmo (2002 : 20) Pengertian akuntabilitas publik adalah:

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Lenvine Dwiyanto (2005:147) mendefenisikan akuntabilitas adalah :

Akuntabilitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.

Sedangkan menurut Mahmudi (2005:9) mengategorikan Akuntabilitas Publik terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (Internal)

Merupakan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh Akuntabilitas kepada kepala dinas kepada bupati atau walikota, Akuntabilitas menteri kepada presiden, Akuntabilitas kepala unit kepada kepala cabang, Akuntabilitas kepala cabang kepada CEO dan sebagainya.

2. Akuntabilitas Horisontal (Eksternal)

Merupakan Akuntabilitas kepada publik atau masyarakat secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.

Didalam tata kelola pemerintah yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip akuntabilitas publik karena akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban atas kegiatannya didalam pengelolaan keuangan daerah.

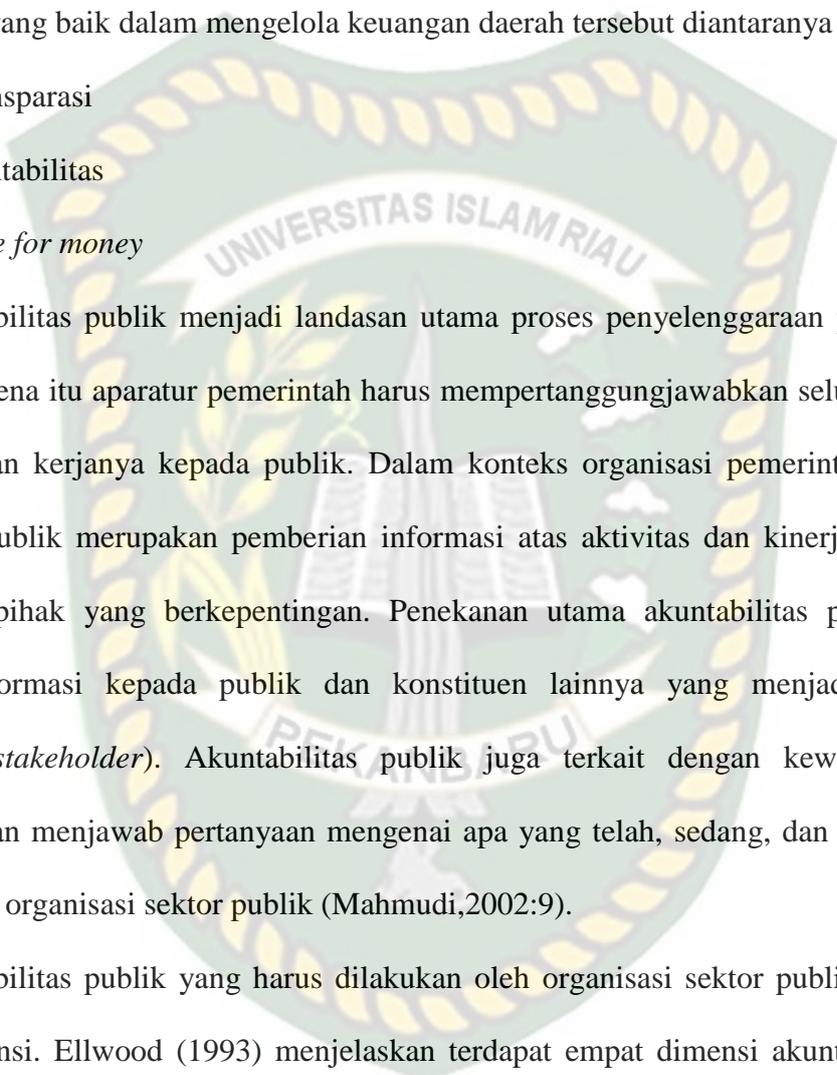
Menurut Mardiasmo (2004:105) prinsip-prinsip akuntabilitas publik pada pemerintahan yang baik dalam mengelola keuangan daerah tersebut diantaranya :

1. Transparasi
2. Akuntabilitas
3. *Value for money*

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mahmudi,2002:9).

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Mardiasmo,2002:22) yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi
3. Akuntabilitas program



Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atau kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2002:12) disamping keempat akuntabilitas diatas ditambahkan akuntabilitas *financial* yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja *financial* organisasi kepada pihak luar.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD (Erlina dan Rasdianto, 2013).

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari

akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan itu sendiri dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering kita sebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi pemerintah daerah itu sendiri terdiri dari akuntansi keuangan pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota (Iskandar, 2014).

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan single entry, double entry dan triple entry (Iskandar, 2014).

Salah satu yang membedakan antara pembukuan dan akuntansi adalah dalam menggunakan sistem pencatatan. Pembukuan hanya menggunakan sistem single entry, sedangkan akuntansi dapat menggunakan double entry dan triple entry (Erlina dan Rasdianto, 2013).

Dalam sistem single entry, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan di dalam buku kas umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat di sisi pengeluaran di dalam buku kas umum. Double entry sering juga disebut sistem tata buku berpasangan. Dimana pencatatan transaksi ekonomi dua kali dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu satu di sisi debit dan satu di sisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi, sistem ini disebut dengan menjurnal.

Sedangkan pencatatan triple entry adalah pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan triple entry ini, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengelolah input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan (Erlina dan Rasdianto, 2013).

Basis Akuntansi

1. Akuntansi Berbasis Kas (Cash Based Accounting)

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang

dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

2. Akuntansi Berbasis Akrua (Accrual Based Accounting)

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, masih menggunakan basis akuntansi "*cash toward accrual*".

3. Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrua (*Cash Toward Accrual Based*

Accounting) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Erlina dan Rasdianto (2013) menerangkan bahwa pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) menjadi laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam LRA terdiri dari Pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, maka LRA memerlukan konversi, yaitu : Belanja tidak langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut: (1) Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai, (2) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan (3) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAR), menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1. Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian internal yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002;180) yaitu :

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut :

- 1) Keandalan pelaporan keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3) Efektivitas dan efisiensi operasi

Menurut Akmal (2007:25), ciri-ciri pengendalian internal yang efektif yaitu:

1. Tujuannya jelas

Jika suatu pengendalian tidak dapat dimengerti, maka prosedur pengendalian tersebut tidak akan digunakan dan jika tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka pengendalian tersebut tidak memiliki nilai.

2. Dibangun untuk tanggung jawab bersama

Suatu pengendalian internal harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna atau oleh seluruh pihak yang berkaitan

3. Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan

Biaya yang dikeluarkan harus mencapai tujuan yang ditetapkan, namun biaya tersebut tidak boleh melebihi dari manfaat yang dihasilkan.

4. Didokumentasikan

Proses dokumentasi yang baik adalah proses dokumentasi yang sederhana dan dapat dengan mudah dimengerti, serta jelas hubungannya dengan risiko pengendalian dan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa pengendalian internal ini berada pada tempatnya.

5. Dapat diuji dan direview

Proses pengendalian dan manajemen dan dokumentasinya dapat diuji dan direview agar dapat disempurnakan atau dapat diperbarui jika proses pengendalian internal yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat pengendalian dilakukan.

Dalam PP No.60 tahun 2008 Sistem pengendalian intern adalah :

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan keyakinan untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien dan keandalan pelaporan keuangan.

2. Value For Money

Tuntutan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* (VfM) dalam menjalankan aktivitasnya (Renyowijoyo, 2008). Mardiasmo (2006) menyatakan *Value for Money* merupakan :

Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Value for Money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

1. **Ekonomi** berkaitan dengan hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudence*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
2. **Efisiensi** (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi, pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*).
3. **Efektivitas** (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak, persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (a) meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; (b) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang,

pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. (c) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; (d) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Diamond, 2002).

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Oleh karena itu laporan keuangan PEMDA harus memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik untuk berbagai kepentingan pengguna salah satunya penggunaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), harus memiliki karakteristik dasar sebagai berikut:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

4. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan adanya pengendalian intern : (1) Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan aset, (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan tujuan sistem pengendalian intern menurut peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara. Hasil penelitian Suprayogi (2010) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

5. Pengaruh *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, serta efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam penelitian Suparmo (2012) tentang Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitiannya adalah bahwa pengaruh *value for money* berpengaruh

negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah SKPD di pemerintahan daerah kota Dumai.

6. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Wahyuni putudkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

7. Penelitian terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hanim, Sustika (2009)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	Variabel Independen: Penyajian Neraca Daerah Variabel Dependen: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Penyajian Neraca Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan positif.

2	Soleha (2011)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Banten	Variabel Independen : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD	.Variabel pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan daerah skpd memiliki pengaruh positif.
3	Anies Iqbal Mustofa (2011)	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang	Variabel Independen : Penyajian dan Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Semua Variabel memiliki pengaruh positif.
4	Putu Riana Primayani (2014)	. Pengaruh pengendalian Internal, <i>Value For Money</i> , Penyajian Laporan Keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Variabel Independen : Pengendalian Internal, <i>Value For Money</i> , Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas laporan keuangan Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Semua Variabel Independen berpengaruh positif terhadap Variabel dependen
5	Wahyuni Putu dkk (2014)	pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas	Variabel Independen: Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan	Variabel Hasil penelitiannya pengaruh penyajian laporan keuangan

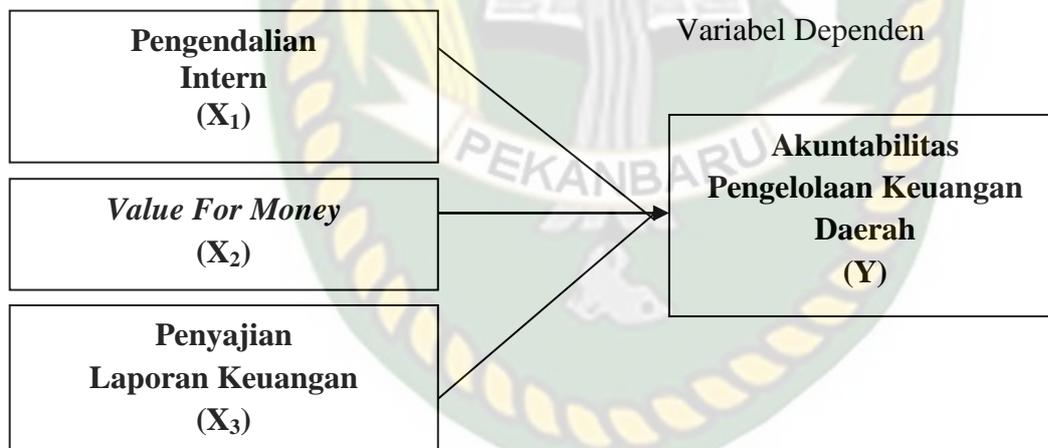
		pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten bandung	keuangan daerah Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah berpengaruh positif.
--	--	---	--	---

8. Model Penelitian

Dari uraian yang dijelaskan diatas mengenai pengaruh pengendalian intern, *value for money* dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka dapat digambarkan model penelitian ini:

**Gambar II.I
Model Penelitian**

Variabel Independen



B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- H2 : *Value For Money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

H3 : Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

H4 : Sistem pengendalian intern, *value for money*, penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau